

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta dalam rangka perwujudan Good Governance, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja adalah merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan tata pemerintah yang baik (Good Governance)

Padang, Januari 2023
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat



NOVRIAL, SE. MA.AK
NIP. 19661105 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN.....	3
	1.1 Gambaran Organisasi.....	3
	1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	10
	1.3 Strategis dan Kebijakan SKPD.....	11
	1.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	13
	1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	17
	2.2 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
	3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	27
	3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	27
	3.3 Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	29
	3.4 Akuntabilitas Anggaran.....	61
BAB IV	PENUTUP.....	76
	4.1 Kesimpulan.....	76
	4.2 Saran.....	77
LAMPIRAN	Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
	Lampiran 2 : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
	Lampiran 3 : Penghargaan yang diterima selama Tahun 2022	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk Tugas Pokok dan Fungsi Dinas disusun sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2020.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tugas

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Fungsi

Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; dan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

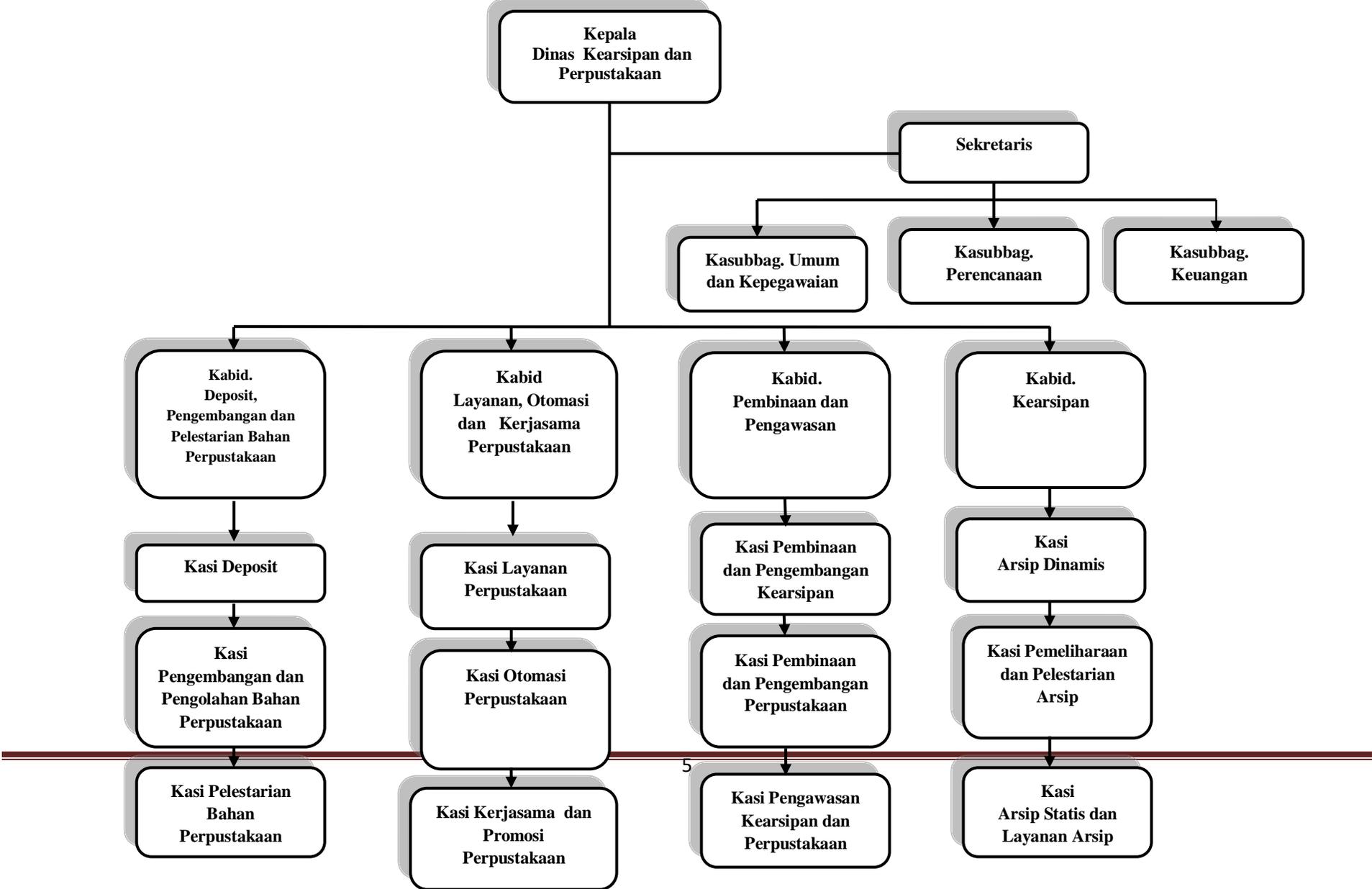
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsiional senior yang ditunjuk. Rincian tugas kelompok jabatan fungsiional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsiional Perencana diharapkan dapat mendorong terbentuknya dan atau pemantapan organisasi profesi dari jabatan fungsiional yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika profesi yang merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsiional dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat



1.1.1 Sumber Daya Manusia

A. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat hingga periode Desember 2022 berjumlah 127 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 72 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 15 orang dan pegawai yang berasal dari pihak ketiga (out sourcing) sebanyak 40 orang.

Alokasi Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan, fungsional, dan jenis kelamin periode Desember 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

1) Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
I	Pejabat Struktural	7
	1. Esselon II	1
	2. Esselon III	5
	3. Esselon IV	1
II	Tenaga Fungsional	46
	1. Fungsional Perencana	1
	2. Analis Kepegawaian	1
	3. Pustakawan	30
	4. Arsiparis	14
III	Staf PNS dan CPNS	34
	Jumlah PNS	87
IV	Tenaga Pihak Ketiga (Out Sourcing)	40
	1. Satuan Pengamanan	20
	2. Tenaga Kebersihan	15
	3. Sopir	5
	Total	127

2) Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Gol. IV	16
2.	Gol. III	47
3.	Gol. II	24
4.	Gol. I	0
	Total	87

3) Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata 2	9
2	Strata 1	41
3	Diploma	15
4	SLTA	21
5	SLTP	0
6	SD	1
	Total	87

4) Jenjang Jabatan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah
1	Arsiparis Tingkat Keahlian	14
2	Arsiparis Tingkat Keterampilan	-
3	Pustakawan Tingkat Ahli	14
4	Pustakawan Tingkat Keterampilan	16
	Total	44

5) Berdasarkan Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
I	PNS	87
	• Laki-laki	44
	• Perempuan	43
II	Pihak Ketiga (Out sourcing)	40
	• Laki-laki	27
	• Perempuan	13
	Total	127

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DAP, tahun 2022

E. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan, serta kinerja aparatur, tentunya peran sarana prasarana sangatlah penting. Berikut pada Tabel 1.2. Disajikan daftar beberapa sarana prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat periode Desember 2022.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Pendukung
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

➤ Aset Tanah

No	Uraian	Lokasi	Luas	Status
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Pustaka dan Sekretariat	Jln. Diponegoro No. 4 Padang	6.277 m ²	Hak Pakai
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Gedung Arsip dan Depo Arsip	Jln. Pramuka VNo. 2 Padang	2.374 m ²	Hak Pakai

➤ Aset Bangunan

No	Uraian	Lokasi	Jumlah	Ket
1	Gedung Arsip	Jln. Pramuka	1	Lantai 1
2	Gedung Depo	Jln. Pramuka	1	Lantai 4
3	Gedung Perpustakaan	Jln. Diponegoro	1	Lantai 4
4	Musholla	Jln. Diponegoro	1	Lantai 1
5	Gudang Genset	Jln. Diponegoro	1	Lantai 1

➤ Aset Kendaraan

No	Uraian	Sumber	Jumlah	Ket
	Roda 4			
1	Minibus Puskel (Truk)	APBN	1	1986
2	Minibus (Mitsubishi /L.300)	APBN	1	1999
3	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2003
4	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2003

No	Uraian	Sumber	Jumlah	Ket
5	Minibus (Toyota)	APBD	1	2004
6	Minibus Puskel (Toyota)	APBN	1	2009
7	Minibus Puskel (Toyota)	APBD	1	2009
8	Minibus Puskel (Toyota)	APBD	1	2009
9	Truk Sadar Arsip (Isuzu)	APBN	1	2010
10	Minibus (Kijang Inova)	APBD	1	2011
11	Mobil Rescue (Ford / Ranger)	APBN	1	2011
12	Minibus (Kijang Inova)	Hibah	1	2019
13	Minibus (Kijang Inova)	APBD	1	2020
	Roda 2			
1	Sepeda Motor (GL. Max)	APBN	1	1996
2	Sepeda Motor (GL. Pro)	APBN	1	1997
3	Sepeda Motor (Suzuki)	APBN	1	1999
4	Sepeda Motor (Honda Win)	APBN	1	1999

➤ **Fasilitas dan Sarana Informasi**

No	Uraian	Lokasi	Jumlah	Ket
1	Papan Pengumuman	Pustaka/Arsip	2	baik
2	Kotak Pengaduan	Pustaka/Arsip	3	baik
3	Jenis Bahan Promosi	Pustaka/Arsip	3	baik
4	Mobil Keliling	Pustaka	5	baik
5	Mobil Operasional	Arsip	3	baik
6	Mobil Rescue	Pustaka/Arsip	1	baik
7	Mobil Sadar Arsip	Arsip	1	baik
8	Website	Pustaka/Arsip	3	baik
9	E-mail	Pustaka/Arsip	1	baik

10	Buku Data dan Informasi	Pustaka	1	baik
11	Booklet Informasi	Pustaka	1	baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DAP, tahun 2022

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi arahan bagi pengembangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. RTRW memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di wilayah Sumatera Barat. Dari pola penyebaran penduduk ini dapat terlihat bagaimana seharusnya arah pembangunan di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat;
2. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi yang juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan jasa dan perdagangan, menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang dan daerah-daerah di sekitar Kota Padang pun ikut merasakan dampak dari hal tersebut. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah di daerah-daerah tersebut haruslah terlaksana, sehingga keterpaduan urusan pembangunan pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan wilayah-wilayah tersebut juga dapat terwujud;
3. Khusus pada bidang Perpustakaan perlu segera melakukan langkah-langkah kebijakan sinkronisasi pembangunan perpustakaan dan kearsipan terkait rencana penataan ruang dengan rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas Perpustakaan dan Kearsipan di setiap Kabupaten/Kota;
4. Dengan ditetapkannya RTRW, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pengemban tugas pelayanan Perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat dan sadar arsip untuk seluruh OPD (pencipta arsip).

Memperhatikan tingkat sebaran penduduk, dan memperhatikan kualitas lingkungan dengan pengembangan ruang terbuka hijau maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan harus dapat memberikan pelayanan berstandar internasional sehingga pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan akan sejajar dengan Provinsi lain;

Terhadap telaahan RTRW dan KLHS di atas, ditelaah dengan menggunakan analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity and Treatah) atau analisa Lingkungan

Internal (kekuatan dan kelemahan) serta analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan). Hasil telaahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 yang menggambarkan Analisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Dinas.

Tabel 1.3

**Analisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat**

A. Lingkungan Internal

KEKUATAN	KELEMAHAN
Adanya potensi dan sumber daya aparatur (Tenaga administrasi, Pustakawan, Fungsional Arsiparis dan tenaga teknis lainnya)	Rendahnya layanan teknologi informasi dan alih media komunikasi
Adanya sumber dana (APBN dan APBD)	Kualitas sumber daya manusia belum memadai
Adanya Undang-Undang tentang Perpustakaan dan Kearsipan serta peraturan perundangan undangan lainnya	Belum terimplementasinya kebijakan sesuai dengan yang diharapkan

B. Lingkungan Eksternal

PELUANG	TANTANGAN
Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemustaka	Rendahnya kesadaran dan minat baca sebagian masyarakat, serta kurangnya sadar arsip masyarakat
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan baca dan informasi	Koleksi bahan bacaan yang kurang bervariasi
Adanya kesiapan masyarakat mengakses teknologi informasi dan komunikasi	Perlunya SDM yang aktif , kreatif di bidang teknologi

Sumber: Data olahan, tahun 2022

1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Arah dan strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Mengacu pada Strategi Pembangunan Sumatera Barat tahun 2021 s.d. 2026 agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat, strategi dan prioritas pemerintah provinsi yang terkait dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan strategi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui :
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik
2. Untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sumatera Barat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
 - a) Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi :
 - Menyusun peraturan / pedoman sistem kearsipan
 - Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital
 - Optimalisasi pelatihan – pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip
 - b) Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi:
 - Akuisisi arsip statis baik diinstansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Organisasi Sosial Politik/Organisasi Masyarakat, Swasta maupun Perorangan
 - Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis
 - Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif
 - c) Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti :
 - Pameran arsip
 - Klinik Arsip
 - Pelayanan informasi arsip
 - d) Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan pelayanan publik;
 - e) Menyelenggarakan tugas pengaturan dengan memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di daerah untuk mengembangkan pelayanan publik yang baik dan optimal, khususnya di bidang perpustakaan;
 - f) Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan;
 - g) Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan.

1.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing urusan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan sebagai berikut:

A. Bidang Perpustakaan, permasalahan yang dihadapi:

1. Masih rendahnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan;
2. Belum terpenuhinya koleksi buku yang dibutuhkan oleh pemustaka dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca;
3. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi pendukung perpustakaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola perpustakaan) dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan.

B. Bidang Kearsipan, permasalahan yang dihadapi:

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas, serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
2. Pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
3. Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kearsipan;
4. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;
5. Status kelembagaan dan kapabilitas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan belum memadai;
6. Belum terpenuhinya jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis dan Pengelola Kearsipan) di masing-masing SKPD Provinsi Sumatera Barat;
7. Masih terbatasnya prasarana dan sarana kearsipan berbasis digital;
8. Program dan kegiatan sosialisasi kearsipan masih kurang.

Dari permasalahan-permasalahan di atas selanjutnya di petakan permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021-2026.

Berikut pada tabel berikut digambarkan pemetaan permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat:

Tabel. 1.4

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A.	Bidang Perpustakaan		
	1. Masih rendahnya budaya literasi 2. Belum terwujudnya perpustakaan sesuai standar berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi	1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book) 2. Rendahnya tingkat budaya literasi	Pengelolaan Perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Provinsi
B.	Bidang Kearsipan		
	1. Tidak adanya jaminan ketersediaan Arsip sebagai alat pertanggungjawaban kegiatan yang autentik dan terpercaya 2. Belum terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dalam pemanfaatan arsip dan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah 2. Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang tidak sebanding dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestarikan 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keberadaan dan ketersediaan arsip

Sumber: Data Olahan DAP, Tahun 2022

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, pada hakekatnya memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. **Bab I : Pendahuluan**

Pada Bab ini menyajikan

- a. Gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Strategi dan Kebijakan OPD
- d. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.
- e. Sistematika Penyajian laporan Kinerja

4. **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Diuraikan ringkasan/iktisar perencanaan kinerja tahun yang bersangkutan

a. Perjanjian Kinerja

Menyajikan target-target penting dan disertai penjelasan apabila terhadap perubahan-perubahan rumusan, sasaran, IKU dan target.

b. Rencana Anggaran tahun 2022

5. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

b. Hasil Pengukuran Kinerja

c. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap tujuan dan sasaran strategis serta IKU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- Menyajikan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis serta efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

d. Akuntabilitas Anggaran

Disajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

6. **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Kersipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Esselon II
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon III, IV dan staf
3. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah selama Tahun 2022
4. Lain lain yang dirasa perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat yang bersangkutan.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

NO	Sasaran Strategis (outcome/output utama)	Indikator Kinerja Utama	Formula
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	$TGM = (0.3TFM + 0.3TDM + 0.3TJB) + (0.05FAI + 0.05DAI)$ Keterangan : Frekuensi membaca (TFM): jumlah aktivitas membaca per minggu Durasi membaca (TDM): lama waktu aktivitas membaca per hari Jumlah Buku Dibaca (TJB): jumlah buku yang telah diselesaikan per 3 bulan Frekuensi Akses Internet (FAI): Frekuensi penggunaan internet untuk mengakses bahan informasi per minggu Durasi Akses Internet (DAI): lama waktu aktivitas akses internet untuk mengakses bahan informasi per hari

		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ <p>UPLMi = Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat mulai dari UPLM1 s.d. UPLM7. AM = Aspek Masyarakat yaitu jumlah masyarakat yang berdasarkan lokus atau segmentasi jenis perpustakaan</p>
2.	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j) / 4$ <p>T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan

			pada tahun n
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	<p>Cara menetapkan Nilai Penimbang</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$ <p>N : Bobot Nilai Unsur</p> <p>Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara :</p> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat merupakan dasar dalam menetapkan Indikator Kinerja sasaran, Sasaran tersebut merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Penetapan sasaran strategis memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Indikator sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Urusan Perpustakaan									
1	Meningkatnya Budaya Literasi		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,05	13	14	15	16	17
		Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	58,05	63,30	64,30	65,30	66,30	67,30
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,05	13	14	15	16	17
B. Urusan Kearsipan									
1	Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	51	53	55	57	59	61
		Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	• Tingkat Ketersediaan Arsip	71	71,50	72	72,50	73	73,50

			• Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66
C	Non Urusan								
1	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani		• Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB 72	BB 72	BB 73	BB 74	BB 75	BB 75
			• Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik -	Baik (77)	Baik (78)	Baik (79)	Baik (80)	Baik (81)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	• Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB 72	BB 72	BB 73	BB 74	BB 75	BB 75
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	• Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik -	Baik (77)	Baik (78)	Baik (79)	Baik (80)	Baik (81)

Sumber: RPJMD tahun 2021-2026

Penetapan target kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dapat dibedakan atas beberapa penghitungan. Berikut dijelaskan dasar penetapan target indikator kinerja tersebut :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan komparasi/ perbandingan dari target rata rata IPLM Tingkat Nasional (data dari Perpunas RI) sebagai berikut :

Sasaran Strategi Perpunas RI	Indikator	Satuan	Target/Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0

Berdasarkan perbandingan target tersebut di atas maka ditetapkanlah target IPLM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan asumsi adanya kenaikan capaian tiap tahunnya dengan melihat sektor atau komponen mana saja yang harus dikembangkan atau ditingkatkan

Sasaran Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	Indikator	Satuan	Target/Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	11,05	13	14	15	16	17

2. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) merupakan Komparasi dari target rata-rata TGM Tingkat Nasional (data Perpustakaan RI) sebagai berikut :
 Hasil akhir tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia dari periode 2017 – 2021 :

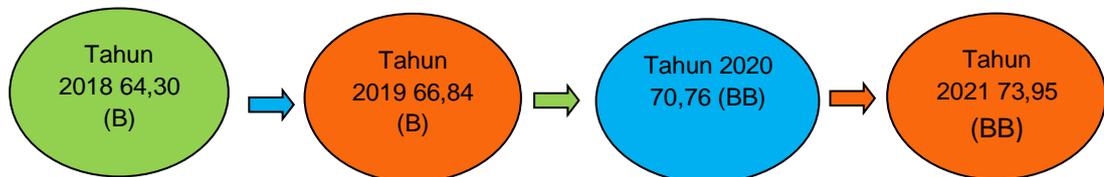
TAHUN 2017	TGM 36,45 (Rendah) Lokasi Kajian di 30 Kab/Kota di 15 Provinsi
TAHUN 2018	TGM 52,92 (Sedang) Lokasi Kajian di 102 Kab/Kota di 34 Provinsi
TAHUN 2019	TGM 53,48 (Sedang) Lokasi Kajian di 102 Kab/Kota di 34 Provinsi
TAHUN 2020	TGM 55,74 (Sedang) Lokasi Kajian di 102 Kab/Kota di 34 Provinsi
TAHUN 2021	TGM 59,52 (Sedang) Lokasi Kajian di 102 Kab/Kota di 34 Provinsi

Berdasarkan hasil akhir dari kajian tingkat kegemaran membaca yang dilaksanakan Perpustakaan RI maka ditetapkan target indikator kinerja tingkat kegemaran membaca (TGM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

TAHUN 2021	Target Indikator Kinerja 58,05
TAHUN 2022	Target Indikator Kinerja 63,30
TAHUN 2023	Target Indikator Kinerja 64,30
TAHUN 2024	Target Indikator Kinerja 65,30
TAHUN 2025	Target Indikator Kinerja 66,30
TAHUN 2026	Target Indikator Kinerja 67,30

3. Penetapan nilai Tingkat ketersediaan arsip berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis di SKPD atau pencipta arsip (ketersediaan daftar arsip aktif dan inaktif), serta nilai pengelolaan arsip statis yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan yang meliputi ketersediaan sarana bantu temu balik arsip statis serta upload arsip statis ke aplikasi JIKN dengan nilai pada awal perencanaan adalah 71 dan diasumsikan adanya peningkatan setiap tahunnya dengan perbaikan serta peningkatan kualitas terhadap rumusan yang dianggap mempengaruhi terhadap hasil dari nilai tingkat ketersediaan arsip.

4. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip ditetapkan targetnya sebesar 76,66 hingga akhir RPJMD. Penetapan tersebut berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip yang meliputi penyelamatan arsip bencana, pemusnahan arsip, autentikasi arsip statis, pencarian arsip yang hilang, pemanfaatan arsip yang bersifat tertutup dan penyelamatan arsip instansi yang dihapus dan digabung atau dibubarkan serta arsip-arsip pemekaran wilayah yang diasumsikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas harus berdasarkan NSPK dan nilai pada awal tahun perencanaan adalah 76,66
5. Tingkat Akuntabilitas Kinerja OPD ditentukan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada beberapa tahun sebelumnya dengan nilai sebagai berikut :



Dengan adanya peningkatan nilai SAKIP setiap tahunnya maka ditetapkan target Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan asumsi adanya perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk tahun selanjutnya.

6. Penetapan target Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ditentukan dengan membandingkan hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada beberapa tahun sebelumnya seperti data berikut :



Dari data capaian tersebut terdapat peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat menjadi pedoman dalam penetapan target untuk tahun selanjutnya dengan asumsi akan selalu ada perbaikan terhadap hasil survey yang dilakukan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah seperti yang telah dijelaskan di atas maka disusunlah **Perjanjian Kinerja Tahun 2022** yang merupakan pernyataan komitmen untuk mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Tujuan Perjanjian Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2021-2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	a. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63,3
		b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	a. Tingkat ketersediaan arsip	71,5
		b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	76,66
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	b. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (77)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13.221.729.710	APBD
2	Pengelolaan Arsip	Rp 138.343.100	APBD
3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 58.194.000	APBD

4	Pembinaan Perpustakaan	Rp 333.159.650	APBD
		Rp 304.614.000	DAK
5	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 78.649.700	APBD
Jumlah		Rp 14.134.690.160	

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63,3
		b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	a. Tingkat Ketersediaan Arsip	71,5
		b. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76,66
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	b. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (77)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13.564.849.710	APBD
2	Pengelolaan Arsip	Rp 497.036.778	APBD
3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 58.194.000	APBD

4	Pembinaan Perpustakaan	Rp 635.759.650	APBD
		Rp 304.614.000	DAK
5	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 78.649.700	APBD
Jumlah		Rp 15.139.103.838	

2.2 Rencana Anggaran Tahun 2022

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan, maka jumlah Anggaran pada APBD perubahan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 15.139.103.838,-** yang digunakan untuk membiayai belanja urusan kearsipan, urusan perpustakaan dan urusan sekretariat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Pagu Anggaran per Urusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Belanja Urusan Kearsipan	555.230.778
2.	Belanja Urusan Perpustakaan	1.019.023.350
3.	Belanja Non Urusan	13.564.849.710
Jumlah		15.139.103.838

Alokasi anggaran belanja urusan tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	1.019.023.350	6,73
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	555.230.778	3,67
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	13.564.849.710	89,60
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		
Total Pagu Anggaran		15.139.103.838	100

Sumber data : Subbag Perencanaan

Pada tabel di atas pada anggaran untuk program/kegiatan sasaran strategis, dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan besaran anggaran Rp.13.564.849.710,- atau 89,60 % dari total pagu anggaran. Sasaran strategis pada urusan perpustakaan sebesar Rp.1.019.023.350,- atau 6,73 % dari total pagu anggaran, dan sasaran dengan anggaran yang sangat kecil adalah sasaran pada urusan kearsipan dengan anggaran sebesar Rp.555.230.778,- atau 3,67 % dari total pagu anggaran. Jika digambarkan dalam bentuk diagram seperti di bawah ini :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari Renstra 2021-2026. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya yang telah disesuaikan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja Instansi pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala penilaian capaian kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini.

**Tabel 3.1
Skala dan Kategori Capaian Kinerja**

No	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan
1	85%-100%	Sangat Baik
2	75%-84%	Baik
3	56%-74%	Cukup
4	< 55%	Kurang

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2022. Adapun capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

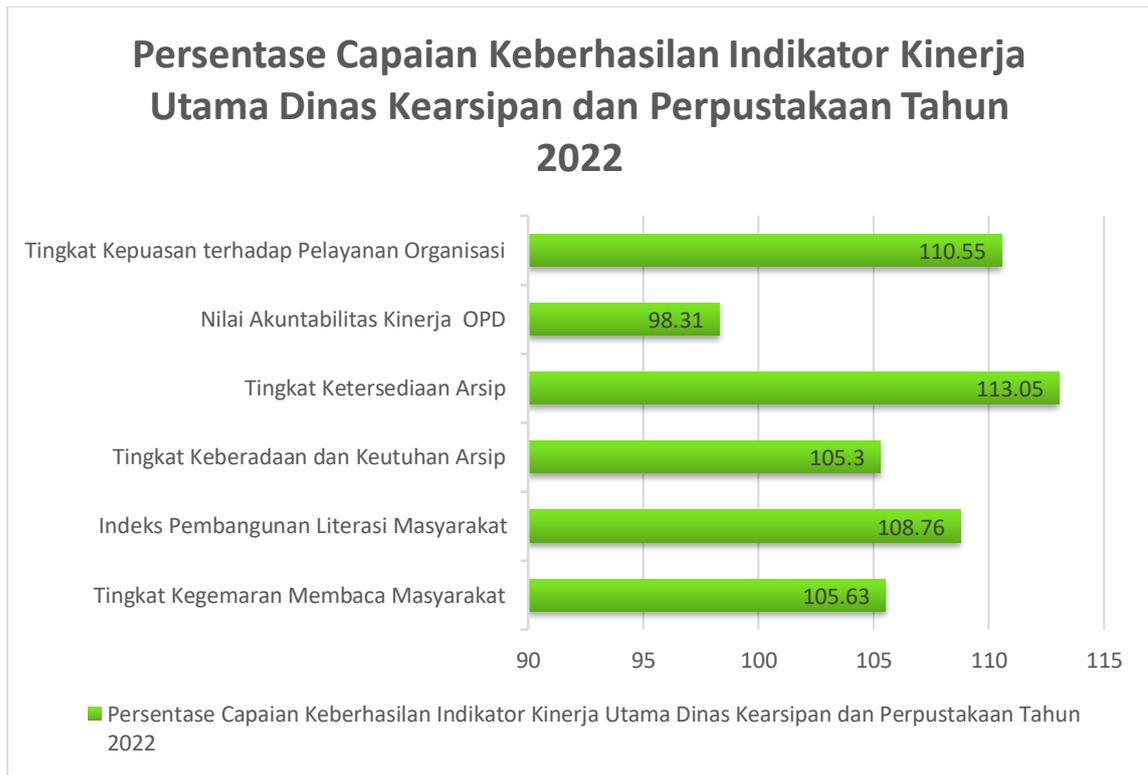
Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63.3	66.87	105.63
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	14.14	108.76
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Tingkat Ketersediaan arsip	71.5	75.29	105.30
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76.66	86.67	113.05
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)	BB (70.79)	98.31
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (77)	Sangat Baik (85.04)	110.44

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama 106,915

Dari tabel 3.2 dapat dilihat rata-rata capaian enam indikator kinerja utama untuk hasil pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan tingkat capaian rata rata di atas 100 persen.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi kriteria sangat baik (85%-100%). Diantara realisasinya bahkan mencapai lebih dari 100% dari rencana kinerja yang ditargetkan. Dari gambar di bawah ini dapat dilihat persentase capaian keberhasilan indikator kinerja utama sebagai berikut :



3.3 Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan menjelaskan dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan 1 : Meningkatnya Budaya Literasi

Sasaran strategis untuk pencapaian tujuan Meningkatnya Budaya Literasi adalah ***Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat*** dengan dua indikator kinerja yaitu Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

I. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Hasil Kajian Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat masih dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Kajian Perpustakaan Nasional RI tentang tingkat kegemaran membaca didasarkan pada indikator utama :

- 1) Frekuensi membaca (TFM), seberapa sering aktivitas membaca dalam 1 minggu (kali/minggu)

- 2) Lama/durasi membaca (TDM), seberapa lama waktu membaca dalam 1 hari (jam/hari)
- 3) Jumlah buku yang tamat dibaca (TJB), seberapa banyak buku yang dibaca dalam 3 bulan(buku/triwulan)
- 4) Frekuensi akses internet (AI), seberapa sering aktivitas akses internet dalam 1 minggu (kali/minggu)
- 5) Durasi atau lama waktu akses internet (DAI), seberapa sering/lama waktu akses internet dalam 1 hari (jam/hari).

Dengan demikian, rumus yang digunakan dalam perhitungan Tingkat Kegemaran Membaca adalah:

$$\text{TGM} = (0,3\text{TFM} + 0,3\text{TDM} + 0,3\text{TJB}) + (0,05\text{FAI} + 0,05\text{DAI})$$

Berdasarkan indikator tersebut diatas, dapat diukur capaian sasaran strategis Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63,3	66,87	105,63

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi indikator kinerja nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat tercapai 105,52%. Realisasi ini masuk kategori tinggi.

Jika dibandingkan dengan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Sumatera Barat pada tahun sebelumnya (kajian Perpustakaan RI) terjadi peningkatan pada indikator kinerja ini, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2021 s/d 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca						

Masyarakat (TGM)	58,05	63,30	61,15	66,87	105,3	105,6
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Data : Perpusnas RI

Dari data tersebut terdapat peningkatan capaian sebesar 0,6 persendari tahun sebelumnya, sedangkan jika disandingkan dengan Provinsi lainnya Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berada pada peringkat pertama untuk wilayah Sumatera dan peringkat 8 untuk tingkat nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



Data : Perpusnas RI

Faktor pendorong kenaikan Tingkat Kegemaran Membaca tersebut antara lain :

- a. Melaksanakan Gerakan ASN membaca 30 menit/hari, dengan membaca 12 judul buku setahun dan selanjutnya diperluas cakupan wilayah administratifnya seperti cakupan sekolahnya, cakupan segmen umurnya, dan basis utama keluarga yang kemudian diperluas ke ke kantor/ lembaga non pemerintahan, kantor-kantor swasta, ruang tunggu praktik dokter, unit usaha UMKM seperti cafe barbershop, dan lainnya.
- b. Melaksanakan Lomba perpustakaan tingkat SMA/SMK se Sumatera Barat
- c. Membuat Pojok baca di kantor-kantor Pemerintahan dan BUMN

- d. Melaksanakan program waqaf buku untuk pustaka nagari dan taman bacaan masyarakat
- e. Melaksanakan sosialisasi budaya baca ke sekolah SMA/SMK dan masyarakat di Sumatera Barat

Selain faktor pendorong tersebut juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian tingkat kegemaran membaca tersebut antara lain :

- a. Rendahnya minat membaca masyarakat yang melakukan aktivitas terhadap kecenderungan membaca, menyimak, melihat dan berbicara (ex : peserta kegiatan lomba pidato, lomba menulis, lomba bercerita dll dengan peserta yang terbatas)
- b. Terbatasnya bahan bacaan yang menarik dan sesuai
- c. Sulitnya masyarakat dalam akses teknologi dan informasi dan mendapatkan bahan bacaan secara online

II. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat.

Indikator pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) ditentukan oleh Perpunas RI sebagai berikut :

A. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat [UPLM], terdiri dari:

- 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan [UPLM1];
- 2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan [UPLM2];
- 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan [UPLM3];
- 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari [UPLM4];
- 5. Perpustakaan ber-SNP [UPLM5];
- 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi & Promosi [UPLM6];
- 7. Anggota Perpustakaan [UPLM7]

B. Aspek Masyarakat yang terdiri dari :

(1) Populasi Penduduk

Data yang digunakan pada populasi penduduk, baik level provinsi maupun Kabupaten/Kota, adalah dengan mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

(2) Populasi Civitas Sekolah

Data yang digunakan pada populasi civitas sekolah adalah data populasi jumlah siswa dan guru. Data jumlah siswa dan guru yang digunakan di sini adalah data siswa dan guru pada SD, SMP, SMA dan SMK.

(3) Populasi Civitas Akademika

Data yang digunakan pada civitas akademika adalah data populasi jumlah mahasiswa dan dosen (tenaga pendidik). Sumber data resmi yang dapat digunakan pada komponen ini adalah publikasi tahunan BPS level provinsi atau BPS level Kabupaten/Kota.

(4) Populasi Penduduk Bekerja

Data yang digunakan pada populasi penduduk usia kerja dapat menggunakan sumber publikasi data resmi tahunan dari BPS level provinsi. Data yang diambil adalah data penduduk yang berstatus Bekerja (Working)

Berdasarkan kajian yang dilakukan pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, diperoleh Hasil IPLM per Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) 1 s/d 7
Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat

KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
Agam	0,0034	1,8377	0,0025	0,3306	1,4238	0,5869	0,3679	65,04
Dharmasraya	0,0032	2,4629	0,0076	0,3780	1,2882	0,0881	0,5999	68,97
Kepulauan Mentawai	0,0038	2,3757	0,0040	0,3627	1,0738	0,2922	0,3414	63,62
Lima Puluh Kota	0,0022	1,5966	0,0029	0,2527	1,3269	0,1019	0,6889	56,74
Kab. Padang Pariaman	0,0032	1,7608	0,0035	0,3103	1,2805	0,0283	0,4870	55,34
Kab. Pasaman	0,0032	2,7644	0,0033	0,2871	1,5858	0,1849	0,6443	78,19
Pasaman Barat	0,0023	1,1956	0,0020	0,2009	1,3385	0,1226	0,4380	47,14
Kab. Pesisir Selatan	0,0032	2,3073	0,0056	0,3405	1,5244	0,7709	0,3361	75,54
Kab. Sijunjung	0,0030	2,2139	0,0073	0,3134	0,5940	0,6883	0,4821	61,46
Kab. Solok	0,0016	0,5360	0,0044	0,1345	1,2942	0,1621	0,5106	37,76
Kab. Solok	0,0020	0,8801	0,0024	0,2959	1,3404	0,2123	0,7244	49,39

Selatan								
Kab. Tanah Datar	0,0016	1,4610	0,0022	0,1633	2,0464	0,0708	0,1958	56,30
Kota Bukittinggi	0,0039	2,6742	0,0077	0,3145	2,2105	0,4267	0,9312	93,84
Kota Padang	0,0032	1,6773	0,0027	0,2663	2,6089	0,0496	0,6037	74,45
Kota Padang Panjang	0,0055	2,2488	0,0076	0,6810	1,9856	0,1522	0,9767	86,54
Kota Pariaman	0,0053	2,3692	0,0055	0,3909	2,1602	0,2855	1,0582	89,64
Kota Payakumbuh	0,0039	1,5766	0,0044	0,2786	2,2107	0,1734	0,6645	70,17
Kota Sawahlunto	0,0037	2,2489	0,0051	0,3603	2,1482	0,0294	0,3939	74,14
Kota Solok	0,0035	0,7080	0,0074	0,8785	2,6408	0,3539	0,6595	75,02
Provinsi Sumatera Barat	0,0033	1,8366	0,0046	0,3442	1,6885	0,2516	0,5844	67,33

Data : Perpusnas RI

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari akumulasi UPLM 1 s/d UPLM7 pada sembilan belas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	67,33	517,9
				14,14 (setelah dikonversi)	108,76

Data olahan Sub Bag Perencanaan

Nilai IPLM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar **67,33** sudah masuk "**KATEGORI SEDANG**" artinya secara nasional nilai IPLM Tahun 2022 sudah memenuhi standar. Nilai IPLM tersebut dihitung berdasarkan pedoman pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat yang dikeluarkan oleh Perpusnas. Jika nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai target Renstra Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, maka hasil IPLM harus dikonversi dengan angka 4,76 (mempedomani tabel usulan konversi skor Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target Renstra yang dikeluarkan oleh Perpustnas RI). Setelah dikonversi dengan angka tersebut, nilai IPLM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menjadi sebesar **14,14**.

Berbeda dengan konsep pada pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun sebelumnya, komponen Aspek Masyarakat (AM) pada tahun ini disesuaikan berdasarkan lokus atau segmentasi jenis perpustakaan. Jika metode perhitungan yang lama, per UPLM pembagiannya adalah jumlah penduduk keseluruhan, jadi nilainya lebih kecil sedangkan pada tahun 2021 dengan penyesuaian bahwa untuk menghitung nilai per UPLM didapat dari masing-masing jenis perpustakaan, dibagi jumlah orang setiap target layanan setiap jenis perpustakaan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2021 s/d 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	11.05	13	14.17	14,14	128,23	108,76

Data olahan sub bag Perencanaan

Dari data tersebut diketahui capaian target realisasi indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami kenaikan setiap tahunnya hal tersebut juga dipengaruhi oleh dukungan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di sembilan belas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam pengumpulan data sebagai bahan survey. Lima Kab/Kota yang pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Bukittinggi 93,84, Kota Pariaman 89,64, Kota Padang panjang 86,54, Kab. Pasaman 78,19, dan Kab. Pesisir Selatan 75,54. Sedangkan, lima Kab/kota yang terendah yaitu Kab. Tanah Datar 56,3, Kab. Padang Pariaman 55,34, Kab. Solok Selatan 49,39, Kab. Pasaman Barat 47,14, dan Kab. Solok 37,76.

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi 14 dari 34 provinsi di Indonesia dengan Nilai IPLM Nasional tahun 2022 adalah sebesar **61,93** dimana setelah dikonversi

dengan angka **4,76**. Maka nilai IPLM Nasional adalah **13,01**. Berikut perbandingan nilai IPLM Provinsi Sumatera Barat dengan Perpustakaan RI seperti table di bawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan target Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sumatera Barat dengan Perpustakaan RI Tahun 2022

Indikator Kinerja	Perpustakaan RI			Provinsi Sumatera Barat		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,0	61,93		13	67,33	
		13,01 (setelah dikonversi)	100,09		14,14 (setelah dikonversi)	108,76

Data olahan Sub Bagian Perencanaan

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh :

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaksanakan launching I-Sumbar mambaco pada Bulan Oktober 2022. Layanan ini menyediakan koleksi buku online yang dapat di akses secara bebas oleh masyarakat.
2. Selain adanya Duta Baca Sumatera Barat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga mengukuhkan Bunda Literasi sebagai role model pembudayaan kegemaran membaca di Sumatera Barat yang berperan aktif menumbuh kembangkan kegemaran membaca masyarakat Sumatera Barat Dalam masa baktinya bunda literasi akan mendorong tim penggerak PKK di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Nagari/ Desa/Kelurahan untuk aktif melaksanakan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca di lingkungannya.
3. Adanya pemerataan layanan perpustakaan dengan puskel (Perpustakaan keliling)
4. Meningkatkan ketercukupan koleksi perpustakaan dengan menyediakan bahan perpustakaan berdasarkan kebutuhan
5. Meningkatkan ketercukupan tenaga perpustakaan
6. Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melaksanakan lomba-lomba seperti lomba pidato dan penulisan naskah Bung Hatta yang diikuti oleh peserta dari SMA/SMK se Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kebangsaan dan literasi pada siswa SMA dan SMK di Sumatera Barat.
7. Memberikan pembinaan ke perpustakaan sehingga sesuai standar nasional perpustakaan
8. Melaksanakan kerjasama dengan instansi, sekolah, akademika, komunitas

terkait dengan aktifitas berkegiatan di perpustakaan, penelitian, pendidikan dan pemanfaatan aplikasi di perpustakaan.

9. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara onsite maupun secara online tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyediakan kelas Bahasa Jepang, Kelas Merajut, Kelas Mendongeng, serta mengundang komunitas literasi di Sumatera Barat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tersedia di Perpustakaan. Terkait dengan perpustakaan berbasis inklusi social, pada Bulan Desember 2022 Dinas Kearsipan mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI yaitu sebagai pemenang lomba Lapak Pada Peer Learning Meeting Nasional di Surabaya dan Tim Sinergi Provinsi Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.



Penerimaan penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI sebagai pemenang lomba Lapak Pada Peer Learning Meeting Nasional di Surabaya dan Tim Sinergi Provinsi Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.



Acara Pengukuhan Bunda Literasi Sumatera Barat oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat

Selain faktor pendukung tersebut juga terdapat faktor penghambat capaian target indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat sebagai berikut :

1. Belum meratanya layanan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota karena setiap jenis perpustakaan yang ada baik di sekolah/nagari/kecamatan di kab/kota sebagian besar masih terbatas infrastruktur, sarana prasarana dan SDM untuk memberikan layanan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pemberian layanan
2. Masih terbatasnya ketercukupan koleksi perpustakaan terutama pada perpustakaan desa, nagari dan perpustakaan sekolah karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan baru dan juga terbatasnya pengadaan melalui swakelola antara lain dari swadaya masyarakat serta dukungan komitmen daerah dalam pengembangan perpustakaan yang masih minim
3. Masih terbatasnya ketercukupan tenaga SDM perpustakaan (minimal 1 orang petugas perpustakaan melayani 2.500 orang pengunjung berdasarkan standar nasional) fokusnya perpustakaan sekolah/desa/nagari/kelurahan karena komitmen kepala sekolah yang belum optimal, terbatasnya SDM pustakawan dengan latar belakang pendidikan perpustakaan
4. Masih rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan serta Kurangnya minat masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara onsite maupun secara online.

Pada tahun 2022 anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat sebesar Rp. 1.019.023.350,- terealisasi Rp. 998.911.770,- atau sebesar 98,02%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,97% atau Rp. 20.111.580,- Efisiensi anggaran tersebut disebabkan adanya sisa tender pengadaan dan pengembangan koleksi buku manual dan elektronik (e-library) serta efisiensi perjalanan dinas.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat yaitu :

1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

➤ Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- ✧ Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
- ✧ Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
- ✧ Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- ✧ Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
- ✧ Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- ✧ Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- ✧ Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

➤ Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- ✧ Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat – Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- ✧ Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

- Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

- Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Sub kegiatan :

- ✧ Penerbitan Katalog Induk Daerah
- ✧ Penerbitan Bibliografi Daerah

- Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

- ✧ Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

- Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Tujuan 2 : Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis untuk pencapaian tujuan Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban yaitu Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip dengan dua indikator kinerja yaitu Tingkat Ketersediaan Arsip dan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip.

**Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	71.5	75.29	105.30
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76.66	86.67	113.05

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip tersebut dijelaskan sebagai berikut :

III. Tingkat Ketersediaan Arsip

Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan yaitu andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip.

Untuk mengukur tingkat ketersediaan arsip dapat dilihat dengan rumusan sebagai berikut :

$$T = (a + i + s + j)/4$$

T = Tingkat ketersediaan arsip

a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip

i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip

s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	40	x 100 %	78,43%
	Jumlah seluruh OPD	51		
i = Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	51	x 100 %	100%
	Jumlah seluruh arsip in-aktif	51		
s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	134	x 100 %	100%
	Jumlah seluruh arsip statis	134		
j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	8.415	x 100 %	22,74%
	Jumlah seluruh arsip statis pemerintah provinsi yang akan diupload	37.000		
Jumlah				301,17%
Tingkat Ketersediaan Arsip	$T = (a + i + s + j)/4$ $(78.43 + 100 + 100 + 22.74) = 301.17/4 : 75.29$			
Persentase Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip adalah				

75,29%

Keterangan :

- Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi. Pada tahun 2022 daftar arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsipnya adalah sebanyak 40 berkas.
- Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif

Pada tahun 2022 jumlah SKPD yang telah dibuatkan daftar arsip inaktif adalah 51 instansi, namun tidak semuanya merupakan SKPD Provinsi, terdapat beberapa instansi di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dibuatkan daftar arsip inaktifnya yaitu KPU (dilaksanakan atas rekomendasi ANRI) dan SMA dan SMK.

- Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan akuisisi terhadap arsip statis yang diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, di tahun 2022 terdapat 134 Arsip statis yang diserahkan atau diakuisisi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dari total arsip yang diserahkan tersebut telah dibuatkan sarana bantu temu baliknya berupa daftar arsip statis sebanyak 134 arsip sehingga capaian untuk penghitungan persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baliknya adalah 100 persen.
- Penetapan rumusan Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN berdasarkan data arsip statis yang akan diupload sebanyak 37.000 (Jumlah seluruh arsip statis pemerintah provinsi yang akan diupload), pada tahun 2020 telah dientrykan 5300 data arsip statis, tahun 2021 telah dientrykan sebanyak 1062 data arsip statis, dan pada tahun 2022 sebanyak 2053 data arsip statis. Sehingga total arsip yang telah di upload adalah 8.415 arsip statis.

Dari daftar, rumusan serta penjelasan tersebut di atas diperoleh tingkat ketersediaan arsip tahun 2022 dengan realisasi capaian sebesar 75,29 dengan persentase capaian 105,30% yang berarti telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu 71,5.

Sandingan capaian indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Sandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip Tahun 2021 s/d 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Tingkat Ketersediaan Arsip	71	71.5	71,80	75.29	101,12	105.30

Data : olahan Sub Bagian Perencanaan

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja tingkat ketersediaan arsip adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan ruang bagi SKPD untuk mempelajari tentang tata kelola arsip dengan membuat Klinik Arsip dan mengundang unsur penanggungjawab (Sekretaris/Subbag Umum) dan arsiparis/pengelola arsip SKPD ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar dapat belajar secara langsung tentang tata cara pengelolaan arsip
2. Memberikan layanan ke masyarakat tentang tata cara perawatan arsip pribadi yang dilaksanakan pada saat pameran arsip di Kabupaten/kota
3. Memberikan pembinaan secara langsung ke SKPD berupa pendampingan terhadap petugas pengelola arsip SKPD tentang tata cara pengelolaan arsip
4. Melakukan pengawasan kearsipan di SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Kota
5. Memberikan layanan informasi akses arsip melalui JIKN dimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menerima penghargaan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2022 Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan SIKN JIKN se Indonesia Tahun 2022, penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh kepala Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Gubernur Sumatera Barat pada saat penyelenggaraan SIKN JIKN se Indonesia di Kota Pekanbaru Riau.



Gubernur Sumatera Barat pada saat menerima Penghargaan Sumatera Barat sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2022 Tingkat Nasional



Piagam Penghargaan Provinsi Sumatera Barat sebagai JIKN Terbaik Nasional

Dari semua faktor pendukung tersebut juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja tingkat ketersediaan arsip antara lain SKPD sebagai pencipta arsip belum melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dengan benar, sehingga daftar arsip yang menjadi bukti indikator kinerja kearsipan di SKPD tidak tersedia

Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip terdapat pada

program Pengelolaan Arsip dengan pagu anggaran sebesar Rp. 497.036.778,- yang terealisasi Rp. 491.402.205,- atau sebesar 98,97%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,03% atau Rp. 5.634.573,-. Hal ini disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan efisiensi pada makan minum rapat

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan dan Keberadaan Arsip yaitu :

1. Program Pengelolaan Arsip dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- ✧ Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- ✧ Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi

- Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
- ✧ Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

- Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN
- ✧ Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

IV. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip yaitu mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Rumusan yang menggambarkan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip dapat dilihat sebagai berikut

$$T = (m + b + g + a + c + i)/6$$

T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK

b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK

g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK

a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK

c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK

i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

Dari rumusan tersebut dapat dihitung capaian indikator kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 sebagai berikut :

Keterangan			
Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	m = 100%	1080 berkas	100%
Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	b = 100%	7 lokasi	100%
Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	g = 20%	Tahap Pendataan	20%
Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	a = 100%	5.009 lembar	100%
Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK	c =100%	Daftar Pencarian dan pengumuman Arsip PDRI	100%
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	i =100%	Pemberian Layanan Arsip Tertutup	100%

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = \frac{(100+100+20+100+100+100)}{6} = 520/6 = 86,67$	520%
Persentase capaian		86,67
Total Capaian Kinerja = (75,29 + 86.67)/2 = 161,96/2 = 80,98%		

Penjelasan terhadap rumusan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Pemusnahan arsip sesuai NSPK dilaksanakan terhadap 1.080 berkas. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria (NSPK) yang tercantum dalam Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Pada tahun 2022, dalam rangka pemusnahan arsip SKPD, telah dilakukan penilaian arsip 3 SKPD, yaitu arsip inaktif Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini menghasilkan daftar arsip usul musnah dan daftar arsip usul simpan pada masing-masing SKPD
2. Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana yang sesuai dengan NSPK dengan skor 100 persen karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria (NSPK) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian edukasi kepada masyarakat pencipta arsip yang dilaksanakan pada 7 institusi, yaitu SMA Negeri 1 Ulakan Kabupaten Padang Pariaman, SMK Negeri 1 Painan Kabupaten Pesisir Selatan, SMK Negeri 3 Kota Payakumbuh, SMK Negeri 1 Padang Panjang, SMK Negeri 1 Solok, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK di provinsi dengan skor 20 %. Skor tersebut diperoleh berdasarkan dengan Perka ANRI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah, untuk melaksanakan penyelamatan arsip instansi yang dihapus dan digabung harus dilakukan 5 tahap kegiatan, yaitu pendataan, penataan, penilaian, pemusnahan dan penyerahan arsip.

Pendataan arsip terhadap 6 SKPD yang berubah nomenklaturnya telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pendataan arsip tersebut dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air, Biro Administrasi Pimpinan, dan Biro Administrasi Pembangunan. Pada proses ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 5 tahapan tersebut hanya melaksanakan satu tahapan yaitu tahapan pendataan dengan skor 20 % dari total 100 % jika semua tahapan telah dilaksanakan. Proses pendataan ini sesuai NSPK sebagaimana tercantum pada Perka ANRI.

4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK dengan skor 100%. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 5.009 lembar arsip statis dan arsip dinamis yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah dilaksanakan autentifikasi sebanyak jumlah tersebut di atas dengan NSPK sebagaimana tercantum dalam Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
5. Pencarian arsip stastis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK dengan skor 100%, dapat dijelaskan bahwa untuk memenuhi indikator tersebut telah dilaksanakan pencarian arsip PDRI pada beberapa lokasi yang bersinggungan dengan peristiwa PDRI tersebut antara lain penelusuran arsip ke keluarga Syafruddin Prawiranegara, ke Solok Selatan yang merupakan tempat persembunyian pada saat peristiwa PDRI, ke ANRI, ke Jogjakarta, ke Perpustakaan Nasional RI, ke Kemenkumham, serta penelusuran ke keluarga Bung Hatta dan Fadli Zon di Jakarta. Pencarian/penelusuran arsip tersebut menghasilkan 1 daftar arsip statis. Arsip PDRI merupakan arsip kewenangan Provinsi Sumatera Barat. Penetapan skor 100% ditetapkan karena proses penelusuran tersebut telah sesuai dengan NSPK sebagaimana tercantum pada Perka ANRI.
6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK dengan skor 100%. Pemberian skor 100 %, karena pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Arsip Statis yang salah satu babnya mengatur

ketentuan tentang penggunaan arsip yang bersifat tertutup, dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

Capaian indikator kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip tahun 2022 dapat disandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Tahun 2021 s/d 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76,66	76,66	70	86,67	91,31	113,05

Data : olahan Subbag. Perencanaan

Faktor pendorong tercapainya realisasi target indikator kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip adalah :

1. Terselenggaranya pameran arsip PDRI pada peringatan Hari Bela Negara yang dilaksanakan pada 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Bukittinggi.
2. Terlaksananya kegiatan pencarian arsip statis yang bernilai sejarah yang merupakan kewenangan Provinsi yaitu arsip Pemerintahan PDRI di Sumatera Barat. Hasil dari pencarian arsip bersejarah tersebut akan menjadi satu daftar arsip.
3. Mengoptimalkan layanan pada layanan kearsipan bagi masyarakat yang memerlukan arsip sebagai bahan untuk penelitian.
4. Memberikan pembinaan kepada kepada SKPD agar melakukan pemindahan arsip secara berkala dengan memanfaatkan JRA.
5. Menetapkan petugas pengelola arsip dengan SK Gubernur yang salah satu tugasnya adalah melaporkan daftar arsip yang mereka kelola sehingga dapat dikontrol kapan SKPD harus memindahkan, memusnahkan ataupun menyerahkan arsipnya ke lembaga kearsipan.



Situasi pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka hari bela negara tahun 2022

Selain faktor pendorong, juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip yaitu masih rendahnya kesadaran SKPD melaksanakan kegiatan penyusutan arsip yang meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip, sehingga arsip yang disimpan betul-betul hanya arsip yang bernilai guna.

Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian indikator kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip terdapat pada program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.194.000,- yang terealisasi Rp. 56.744.959,- atau sebesar 97,51%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,48% atau Rp. 1.499.041-. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada pembelian alat tulis kantor dan efisiensi pada makan minum rapat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

- Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun

Sub kegiatan :

- ✧ Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah (sepuluh) 10 Tahun
- Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana
- Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi

Sub kegiatan :

- ✧ Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Tujuan 3 : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Untuk pencapaian tujuan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani terdapat dua sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja masing masing sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

V. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Penetapan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun penilaian. Pada tahun 2022 hasil evaluasi nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)	BB (70,79)	98,31

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak tercapai dengan capaian realisasi kurang dari 100%. Perbandingan Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2021 s/d 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	72	73,95	70,79	102,7	98,31

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan

Dari tabel diatas dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tidak terpenuhi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2021 adalah 73,95 yang berarti ada penurunan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,16 nilai. Penurunan terhadap capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 dan 2022

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	25,58	24,61
2	Pengukuran Kinerja	25	18,13	18,47
3	Pelaporan Kinerja	15	12,41	11,51
4	Evaluasi Internal	10	5,70	5,70
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	12,14	10,50
NILAI HASIL EVALUASI		100	73,96	70,79

Data : Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.13 dapat dilihat realisasi indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan beberapa komponen nilai/bobot penilaian pada Lakip tahun 2022 yang mempengaruhi penilaian.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD yaitu :

A. Perencanaan Kinerja

- Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah disusun dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan Perjanjian Kinerja telah selaras dengan Renstra dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.
- Renstra dan Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan melalui website dap dan sumbarprov.go.id
- Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja telah disusun secara implisit dan selaras dengan Renstra
- Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- Perjanjian Kinerja telah sesuai dengan cascading dan telah di breakdown

B. Pengukuran Kinerja

- Indikator Kinerja telah ditetapkan sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah dipublikasikan
- Telah terdapat indikator kinerja eselon III dan IV sebagai turunan dari indikator kinerja atasannya
- Telah terdapat indikator kinerja individu

C. Pelaporan Kinerja

- Telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan
- Laporan kinerja telah menyajikan sasaran indikator kinerja
- Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan dan evaluasi serta analisis

D. Evaluasi Internal

- Telah menyusun SOP terhadap evaluasi kinerja
- Evaluasi program telah dilakukan
- Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan

E. Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi

- Pencapaian sasaran kinerja organisasi telah ditetapkan
- Pencapaian rata rata di atas 100 persen

Selain faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD juga terdapat faktor penghambat sebagai berikut :

- Rencana aksi belum mencantumkan target kinerja secara periodik atas kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta dimonitor pencapaiannya secara berkala
- Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan.
- Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi atau capaian organisasi /instansi sejenis, setara atau sekelas.
- Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendetail sehingga besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasi, bukan hanya info tentang efisiensi yang telah dilakukan.
- Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi belum mencantumkan kesimpulan dan keberhasilan dari rencana/agenda.
- Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

VI. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, diukur dengan indicator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pengukuran tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ini dilakukan dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Sasaran survey adalah masyarakat yang berkunjung ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk tahun 2022 survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan hanya satu kali dengan proses penyampaian sampling di laksanakan pada bulan November hingga Desember 2022.

Dasar penyusunan survey kepuasan masyarakat ini adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik selanjutnya dengan sasaran untuk :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yaitu :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dari 9 unsur tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi sebelas daftar pertanyaan yang akan disampaikan melalui E-kuesioner. Survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk tahun 2022 sebanyak satu kali dengan proses penyampaian sampling di laksanakan pada bulan November hingga Desember 2022.

Tahapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat :

Untuk kelancaran pelaksanaan survei maka diperlukan pemenuhan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan tersebut meliputi penyiapan kuesioner, menentukan sampel, mengumpulkan data, dan mengolah data survey. Teknis survey yang dilakukan adalah dengan kuesioner elektronik yang disampaikan kepada masyarakat yang berkunjung ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Tahap awal yang dilakukan dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat ini adalah menentukan profil responden yang akan mengisi kuesioner elektronik. Profil responden tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok kategori yaitu :

1. berdasarkan jenis kelamin
2. Berdasarkan usia
3. Berdasarkan tingkat pendidikan
4. Berdasarkan pekerjaan

Profil responden yang mengisi kuesioner elektronik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan data yang masuk adalah 187 responden, namun untuk kebutuhan penghitungan tingkat kepuasan masyarakat hanya 150 data kuesioner yang diproses selanjutnya. Data profil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Profil Responden Survey Kepuasan Masyarakat
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022

No	Variabel	Kategori	Jumlah Responden	Persentase %
1	2	3	4	5
1	Umur	0-20	78	52%
		21-40	72	48%
		41-60	0	0%
		61-80	0	0%
2	Jenis kelamin	pria	50	34%
		Wanita	100	64%
3	pendidikan	Sd	7	4.6%
		Smp	20	13.4%
		Sma	70	46.7%
		D1, d2 , d3	23	15.3%
		S1	30	20%
		S2 keatas	0	0%
4	Pekerjaan	Pns	10	6.7
		Pegawai	10	6.7

	Wiraswasta/ usahawan	13	8.67
	Pelajar/ mahasiswa	110	73.33%
	lainnya	7	4.6

Data olahan Sub Bagian Perencanaan

METODE PENGHITUNGAN :

Metode penghitungan menggunakan desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Pilihan A bernilai 4

Pilihan B bernilai 3

Pilihan C bernilai 2

Pilihan D bernilai 1

Berdasarkan jawaban dari 150 responden yang telah mengisi 11 pertanyaan unsur pelayanan diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.16
Nilai IKM Berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Unsur	Nilai Rata rata
U1	Prosedur Pelayanan	512	3.413
U2	Persyaratan Pelayanan	493	3.286
U3	Kejelasan Informasi Layanan	500	3.333
U4	Kompetensi/Kemampuan	495	3.3
U5	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	529	3.526
U6	Ketepatan Waktu Pelayanan	511	3.406
U7	Kesopanan dan Keramahan	497	3.313
U8	Tanggung Jawab Personil Dalam Memberikan Pelayanan	513	3.42
U9	Keadilan Pelayanan	518	3.453

U10	Dukungan Infrastruktur Penunjang Pelayanan	515	3.433
U11	Keamanan dan Kenyamanan	530	3.533
Rata rata nilai unsur		5.613	37,42

Data olahan Sub Bagian Perencanaan

Dari 11 pertanyaan unsur pelayanan berdasarkan data jawaban responden terhadap kuesioner yang disampaikan (data responden terlampir) diperoleh jumlah nilai unsur 5.613 dengan nilai rata rata sebesar 37,42. Selanjutnya proses pengolahan data berdasarkan rumusan sebagai berikut :

1. N = nilai total yang diberikan rata rata responden

2. Nilai maksimal adalah 44 (4 dikali 11 pertanyaan)

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Nilai IKM} &= \frac{N}{44} \times 100\% \\
 &= \frac{37.42}{44} \times 100\% \\
 &= 85,04
 \end{aligned}$$

Data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada bulan November sampai Desember 2022 yang diolah secara online oleh tim Sub Bagian Perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan jumlah responden Survei sebanyak 150 responden diperoleh nilai 85,04

Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Nilai IKM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 85.04 berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, masuk kategori kinerja unit pelayanan dengan kriteria nilai **Baik**.

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	77 Nilai	85,04	110,44 %

Data olahan Sub bagian Perencanaan

Realisasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2022 dapat dibandingkan dengan tahun 2021, untuk perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	77	84,93	85,04	113,24	110,44

Data : Sub Bagian Perencanaan

Dari perbandingan hasil survey kepuasan masyarakat dari tahun 2021 tersebut diketahui terjadinya peningkatan terhadap realisasi target dan capaian untuk tahun 2022. hal tersebut dapat diartikan adanya peningkatan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada masyarakat selaku pengguna layanan.

Faktor pendorong meningkatnya nilai hasil survey kepuasan masyarakat di sebabkan antara lain :

1. Faktor keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh pengunjung saat berkegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Meningkatnya kedisiplinan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat
3. Adanya keadilan Petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
4. Meningkatnya insfrastruktur penunjang pelayanan seperti tersedianya ruang baca terbuka serta fasilitas pendukung lainnya.

Faktor penghambat nilai hasil survey kepuasan masyarakat disebabkan antara lain :

1. Adanya faktor ketidaksesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Kompetensi/kemampuan petugas yang melayani
3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan
4. ketepatan waktu pelayanan belum sesuai dengan SOP

Anggaranyang dialokasikan dalam APBD Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasiterdapat pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahdengan pagu anggaran sebesar Rp13.564.849.710,- yang terealisasi Rp12.575.245.505,- atau sebesar 92,7%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,3% atau Rp. 989.604.203-. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada sisa tender, sisa perjalanan dinas, sisa ATK, sisa honor, sisa gaji dan tunjangan kinerja pegawai.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- ❖ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ❖ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.4 Akuntabilitas Anggaran

3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pagu Anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam DPA Tahun 2022 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 15.139.103.838,-. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai 5 (lima) program yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dari pagu anggaran tersebut, untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 14.122.304.439,- sehingga persentase daya serap sampai Desember 2021 adalah sebesar 93.28 %.

Adapun Anggaran dan realisasi belanjatahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 Per Sasaran
(Berdasarkan APBD Perubahan 2022)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	(Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63.3	66.87	105.63	1.019.023.350	998.911.770	98.02
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	14.14	108.76			
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	71.5	75.29	105.30	497.036.778	491.402.205	98.87
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76.66	86.67	113.05	58.194.000	56.744.959	97.51
3	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)	BB (70.79)	98.31	13.564.849.710	12.575.245.505	92.7
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (77)	Sangat Baik (85.13)	110.55			

Realisasi kinerja keuangan pada 5 (lima) program di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2022
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2022	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	TOTAL	15.139.103.838,00	14.122.304.439,00	93.28	
I	Program Pembinaan Perpustakaan	940.373.650,00	920.911.770,00	97.93	100
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	787.111.550,00	772.931.282,00	98.2	100
1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	391.241.000,00	384.224.392,00	98.21	100
1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	52.467.400,00	52.317.500,00	99.71	100
1.3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	22.843.800,00	22.675.800,00	99.26	100

1.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	218.561.000,00	213.744.586,00	97.8	100
1.5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	15.936.550,00	14.666.550,00	92.03	100
1.6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	16.999.800,00	16.474.100,00	96.91	100
1.7	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	56.241.000,00	56.220.850,00	99.96	100
1.8	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	12.821.000,00	12.607.504,00	98.33	100
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	106.207.452,00	92.602.800,00	87.19	100
2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	115.380.700,00	110.148.838,00	95.47	100
2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	20.000.000,00	20.000.000,00	100	100
2.3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	17.881.400,00	17.831.650,00	99.72	100
II	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	78.649.700,00	78.000.000,00	99.17	100
1	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	16.034.500,00	16.028.500,00	99.96	100
1.1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	41.082.700,00	25.186.990,00	99.96	100
2	Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	19.169.200,00	19.146.500,00	99.88	100
2.1	Penerbitan Katalog Induk Daerah	11.786.000,00	11.764.000,00	99.81	100
2.2	Penerbitan Bibliografi Daerah	7.383.200,00	7.382.500,00	99.99	100
3	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	28.446.000,00	28.092.600,00	98.76	100
3.1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	14.648.000,00	14.546.400,00	99.31	100
3.2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	13.798.000,00	13.546.200,00	98.18	100
4	Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	15.000.000,00	14.732.400,00	98.22	100
4.1	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	15.000.000,00	14.732.400,00	98.22	100
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.564.849.710,00	12.575.245.505,00	92.7	100
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.936.900,00	66.611.500,00	96.63	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.936.900,00	52.143.400,00	96.67	100

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.468.100,00	96.45	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.159.424.823,00	9.335.967.259,00	91.89	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.998.790.073,00	9.183.884.509,00	91.85	100
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.640.000,00	117.240.000,00	93.31	100
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.135.750,00	12.014.750,00	99	100
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22.859.000,00	22.828.000,00	99.86	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	109.013.800,00	107.920.220,00	99	100
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	106.200.000,00	105.106.420,00	98.97	100
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.388.800,00	1.388.800,00	100	100
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	100	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.500.000,00	56.999.943,00	88.37	100
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.500.000,00	56.999.943,00	88.37	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.256.340,00	354.330.100,00	95.70	100
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.682.650,00	9.580.000,00	98.94	100
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.574.500,00	35.483.100,00	99.74	100
5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.270.000,00	18.270.000,00	100	100
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.870.000,00	24.360.000,00	97.95	100
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.827.850,00	347.539.456,00	99.92	100
5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	100	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.327.815.167,00	2.184.440.166,00	93.84	100
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.700.000,00	97	100
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	564.528.600,00	558.733.493,00	98.97	100
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.753.286.567,00	1.616.006.673,00	92.17	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.684.020,00	386.823.861,00	97.27	100
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000,00	40.169.000,00	97.52	100
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.230.000,00	113.238.850,00	94.19	100

7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.940.000,00	12.935.000,00	99.96	100
7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.324.020,00	220.481.011,00	98.73	100
IV	Program Pengelolaan Arsip	497.036.778,00	491.402.205,00	98.87	100
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	60.160.000,00	58.996.690,00	98.07	100
1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	13.650.000,00	13.125.500,00	96.16	100
1.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	14.400.000,00	14.050.100,00	97.57	100
1.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	32.110.000,00	31.821.090,00	99.1	100
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	396.803.428,00	393.776.050,00	99.24	100
2.1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	13.536.350,00	13.503.950,00	99.76	100
2.2	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	383.267.078,00	380.272.100,00	99.22	100
3	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	40.073.350,00	38.629.465,00	96.4	100
3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	11.452.100,00	11.427.690,00	99.79	100
3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	28.621.250,00	27.201.775,00	95.04	100
V	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	58.194.000,00	56.744.959,00	97.51	100
1	Kegiatan Pemusnahan Arsip dilindungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	13.898.000,00	13.576.560,00	97.69	100
1.1	Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	13.898.000,00	13.576.560,00	97.69	100
2	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	14.296.000,00	14.041.054,00	98.22	100
2.1	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	14.296.000,00	14.041.054,00	98.22	100
3	Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	30.000.000,00	29.127.345,00	97.09	100
3.1	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30.000.000,00	29.127.345,00	97.09	100

Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 termasuk kategori keberhasilan sangat baik dengan persentase capaian fisik 100% dan keuangan 93,28%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh :

- a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- b. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap perencanaan anggaran dan penatausahaan pertanggungjawab realisasi fisik dan keuangan.
- c. Penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menargetkan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 25 tiap bulannya sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan setiap bulan.

Upaya untuk mempertahankan pencapaian indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan lainnya secara konsisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bidang Akuntansi dan BUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- b. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dan lainnya yang dijadwalkan oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah, Bidang akuntansi dan instansi lainnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaporan aset secara berkala.
- c. Melaksanakan review laporan keuangan secara berkala (triwulan, semester dan tahunan).

3.4.2 ANALISIS EFISIENSI TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Dalam pelaksanaannya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan program, kegiatan, tujuan sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator Kinerja atau Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran

atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat efisiensi penggunaan anggaran masing masing program. Efisiensi anggaran ini antara lain terdapat pada :

1. Efisiensi pada perjalanan dinas.
2. Efisiensi karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga pasar yang berlaku.
3. Efisiensi pada belanja makan dan minum kegiatan
4. Efisiensi belanja BBM

Efisiensi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi Terhadap Penggunaan Anggaran dan SDM

Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Realisasi	Anggaran Perubahan Tahun 2022	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	Keterangan
					Rp	%		
PENDAPATAN (DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN BUKU)				5.000.000,00	2.122.000,00	42.44	2.878.000,00	
TOTAL				15.139.103.838,00	14.122.304.439,00	93.28	1.016.799.399,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.019.023.350,00	998.911.770,00	98.02	20.111.580	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				940.373.650,00	940.373.650,00	97.33	19.461.880,00	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				787.111.550,00	772.931.282,00	98.2	14.180.268,00	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	- E-book/buku digital yang tersedia - Jaringan perpustakaan yang terpelihara - Pengadaan sarana dan prasarana modern	- 300 Copy - 1 Jaringan - 10 Jenis	- 300 Copy - 1 Jaringan - 10 Jenis	391.241.000,00	384.224.392,00	98,21	7.016.608,00	Telah terlaksana sesuai target
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	- Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan daerah provinsi - Tersedianya sarana pelayanan	- 30.000 Orang - 2 Unit	- 58.767 Orang - 2 Unit	52.467.400,00	52.317.500,00	99,71	149.900,00	Telah terlaksana sesuai target
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Koleksi konten lokal Sumatera Barat yang tersedia	150 Eksemplar	151 Eksemplar	22.843.800,00	22.675.800,00	99,26	168.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan provinsi dan Kab/Kota yang telah dinilai - Jumlah perpustakaan menengah dan pendidikan khusus yang dibina	19 Perpustakaan	19 Perpustakaan	218.561.000,00	213.744.586,00	97,8	4.816.414,00	Telah terlaksana sesuai target
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	- DUPAK/PAK Pustakawan Provinsi dan Kab/Kota yang telah dinilai - Pengelola Perpustakaan Pendidikan Menengah yang ditingkatkan kapasitasnya dan	- 40 PAK - 30 Orang	- 40 PAK - 30 Orang	15.936.550,00	14.666.550,00	92,03	1.270.000,00	Telah terlaksana sesuai target

	kompetensinya							
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan layanan rujukan di tingkat provinsi	1 Layanan	1 Layanan	16.999.800,00	16.474.100,00	96.91	525.700,00	Telah terlaksana sesuai target
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bahan pustaka cetak yang tersedia	500 Eksemplar	500 Eksemplar	56.241.000,00	56.220.850,00	99.96	20.150,00	Telah terlaksana sesuai target
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pustakawan tingkat daerah Provinsi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.821.000,00	12.607.504,00	98.33	213.496,00	Telah terlaksana sesuai target
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				153.262.100,00	147.980.488,00	96.55	5.281.612,00	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	- Sosialisasi budaya baca yang dilaksanakan pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat - Sosialisasi budaya baca yang dilaksanakan pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat	- 50 Orang - 2 Kegiatan	- 50 Orang - 2 Kegiatan	115.380.700,00	110.148.838,00	95.47	5.231.862,00	Telah terlaksana sesuai target
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat – Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya ruang baca terbuka	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	100	-	Telah terlaksana sesuai target
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pelatihan keterampilan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang	17.881.400,00	17.831.650,00	99.72	49.750,00	Telah terlaksana sesuai target
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				78.649.700,00	78.000.000,00	99.17	649.700,00	
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi				16.034.500,00	16.028.500,00	99.96	6.000,00	
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Karya cetak/rekam yang dihimpun dan dikelola	200 Eksemplar	230 Eksemplar	41.082.700,00	25.186.990,00	99.96	6.000,00	Telah terlaksana sesuai target

Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah				19.169.200,00	19.146.500,00	99.88	22.700,00	
Penerbitan Katalog Induk Daerah	Buku Katalog Induk Daerah (KID)	1 Terbitan	1 Terbitan	11.786.000,00	11.764.000,00	99.81	22.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Penerbitan Bibliografi Daerah	Buku Bibliografi Induk Daerah (BID)	1 Terbitan	1 Terbitan	7.383.200,00	7.382.500,00	99.99	700,00	Telah terlaksana sesuai target
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi				28.446.000,00	28.092.600,00	98.76	353.400,00	
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Inventarisasi dan pendaftaran Naskah Kuno	3 Naskah	3 Naskah	14.648.000,00	14.546.400,00	99.31	101.600,00	Telah terlaksana sesuai target
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	- Alihmedia naskah kuno dan koleksi klasik ke digital/ e-book - Termanfaatkannya layanan naskah kuno dank has daerah oleh pemustaka/ masyarakat	- 15 Alihmedia - 750 Orang	- 21 Alihmedia - 750 Orang	13.798.000,00	13.546.200,00	98.18	251.800,00	Telah terlaksana sesuai target
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				15.000.000,00	14.732.400,00	98.22	267.600,00	
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi Minangkabausiana	150 Koleksi	155 Koleksi	15.000.000,00	14.732.400,00	98.22	267.600,00	Telah terlaksana sesuai target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				14.120.080.488,00	13.123.392.669,00	92.94	996.687.819,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				13.564.849.710,00	12.575.245.505,00	92.7	989.604.205,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				68.936.900,00	66.611.500,00	96.63	2.325.400,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	5 Dokumen	5 Dokumen	53.936.900,00	52.143.400,00	96.67	1.793.500,00	Telah terlaksana sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LAKIP, LPPD,	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	14.468.100,00	96.45	531.900,00	Telah terlaksana sesuai target

	LKPJ, Laporan Tahunan)							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.159.424.823,00	9.335.967.259,00	91.89	823.457.564,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	86 Orang	87 Orang	9.998.790.073,00	9.183.884.509,00	91.85	814.905.564,00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	11 Orang	11 Orang	125.640.000,00	117.240.000,00	93.31	8.400.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.135.750,00	12.014.750,00	99	121.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	22.859.000,00	22.828.000,00	99.86	31.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				109.013.800,00	107.920.220,00	99	1.093.580,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	9 Unit	9 Unit	106.200.000,00	105.106.420,00	98.97	1.093.580,00	Telah terlaksana sesuai target
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.388.800,00	1.388.800,00	100	-	Telah terlaksana sesuai target
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.000,00	1.425.000,00	100	-	Telah terlaksana sesuai target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64.500.000,00	56.999.943,00	88.37	7.500.057,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	86 Stel	76 Stel	64.500.000,00	56.999.943,00	88.37	7.500.057,00	Telah terlaksana sesuai target
Administrasi Umum Perangkat Daerah				370.256.340,00	354.330.100,00	95.70	992.444,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	235 Buah	235 Buah	9.682.650,00	9.580.000,00	98.94	102.650,00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	428 Bulan	428 Bulan	35.574.500,00	35.483.100,00	99.74	91.400,00	Telah terlaksana sesuai target

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	623 Unit	623 Unit	18.270.000,00	18.270.000,00	100	-	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	156 Eksemplar	156 Eksemplar	24.870.000,00	24.360.000,00	97,95	510.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	45 Dokumen	45 Dokumen	347.827.850,00	347.539.456,00	99,92	288.394,00	Telah terlaksana sesuai target
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang dikelola	200 Arsip	200 Arsip	1.250.000,00	1.250.000,00	100	-	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.327.815.167,00	2.184.440.166,00	93,84	143.375.001,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 Tahun	1200 Surat	1659 Surat	10.000.000,00	9.700.000,00	97	300.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan - Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	- 100 Mbps - 3 Rekening - 1344 Meter Kubik - 353678 KVA	- 100 Mbps - 3 Rekening - 1344 Meter Kubik - 353678 KVA	564.528.600,00	558.733.493,00	98,97	5.795.107,00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa kesehatan jasmani (senam mingguan), jasa kesehatan rohani, jasa rohaniawan - Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	- 12 Bulan - 40 Orang	- 12 Bulan - 40 Orang	1.753.286.567,00	1.616.006.673,00	92,17	137.279.894,00	Telah terlaksana sesuai target
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				397.684.020,00	386.823.861,00	97,27	10.860.158,98	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	41.190.000,00	40.169.000,00	97,52	1.021.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	120.230.000,00	113.238.850,00	94,19	6.991.150,00	Telah terlaksana sesuai target

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18 Unit	18 Unit	12.940.000,00	12.935.000,00	99,96	5.000,00	Telah terlaksana sesuai target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	47 Unit	47 Unit	223.324.020,00	220.481.011,00	98,73	2.843.008,98	Telah terlaksana sesuai target
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				497.036.778,00	491.402.205,00	98,87	5.634.573,00	
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				60.160.000,00	58.996.690,00	98,07	1.163.310,00	
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pencipta arsip yang melakukan proses penciptaan dan penggunaan arsip dinamis sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan	3 Pencipta Arsip	3 Pencipta Arsip	13.650.000,00	13.125.500,00	96,16	524.500,00	Telah terlaksana sesuai target
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pencipta arsip yang melakukan proses pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	3 Pencipta Arsip	3 Pencipta Arsip	14.400.000,00	14.050.100,00	97,57	349.900,00	Telah terlaksana sesuai target
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pencipta arsip yang diaudit dan dilakukan monitoring audit hasil pelaksanaan audit kearsipan internal dan eksternal - Jumlah pencipta arsip yang diaudit dan dilakukan monitoring audit hasil pelaksanaan audit kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 SKPD - 16 LKD 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 SKPD - 16 LKD 	32.110.000,00	31.821.090,00	99,1	288.910,00	Telah terlaksana sesuai target
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				396.803.428,00	393.776.050,00	99,24	3.027.378,00	
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Volume arsip terjaga yang dikelola serta dilaporkan dan disampaikan salinan otentiknya ke ANRI	1 Daftar Arsip Terjaga	1 Daftar Arsip Terjaga	13.536.350,00	3.503.950,00	99,76	32.400,00	Telah terlaksana sesuai target
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	<ul style="list-style-type: none"> - Akses dan Layanan Arsip - Jumlah arsip statis yang di akusisi dan diolah dari pencipta arsip - Jumlah arsip statis yang dipreservasi (arsip konvensional dan arsip 	<ul style="list-style-type: none"> - 500 Orang/ Pengguna Arsip - 4 SKPD - 2 Jenis Media Arsip 	<ul style="list-style-type: none"> - 1440 Orang/ Pengguna Arsip - 4 SKPD - 2 Jenis Media Arsip 	383.267.078,00	380.272.100,00	99,22	2.994.978,00	Telah terlaksana sesuai target

	media baru)							
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				40.073.350,00	38.629.465,00	96.4	1.443.885,00	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data dan informasi arsip statis yang bisa diakses melalui JIKN - Terselenggaranya simpul jaringan informasi kearsipan antar lembaga kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - 2000 Data Entry Arsip - 6 Simpul Jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> - 2000 Data Entry Arsip - 6 Simpul Jaringan 	11.452.100,00	11.427.690,00	99.79	24.410,00	Telah terlaksana sesuai target
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> -Pembinaan kinerja arsiparis pada lembaga kearsipan daerah - Penilaian kinerja arsiparis (PAK, dan arsiparis terbaik) 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 LKD - 40 Arsiparis 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 LKD - 40 Arsiparis 	28.621.250,00	27.201.775,00	95.04	1.419.475,00	Telah terlaksana sesuai target
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				58.194.000,00	56.744.959,00	97.51	1.449.041,00	
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				13.898.000,00	13.576.560,00	97.69	321.440,00	
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah pencipta arsip yang melakukan penilaian, penetapan, dan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	3 SKPD	3 SKPD	13.898.000,00	13.576.560,00	97.69	321.440,00	Telah terlaksana sesuai target
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi				14.296.000,00	14.041.054,00	98.22	254.946,00	
Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah simulasi perlindungan dan penyelamatan arsip bencana yang akan dilakukan dalam rangka evakuasi, identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan arsip akibat bencana	7 Kali	7 Kali	14.296.000,00	14.041.054,00	98.22	254.946,00	Telah terlaksana sesuai target

Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi				30.000.000,00	29.127.345,00	97.09	872.655,00	
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alihmedia yang dinilai dan ditetapkan autentisitasnya sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	5000 Lembar	5000 Lembar	30.000.000,00	29.127.345,00	97.09	872.655,00	Telah terlaksana sesuai target

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran

4.1.1 Kesimpulan

- a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 yang telah disesuaikan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2022, serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026.
- b) Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian target empat sasaran strategis dengan enam Indikator Kinerja Utama.
- c) Rata-rata capaian enam indikator Kinerja Utama sebesar 106,91%. Artinya secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2022 termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik yaitu (85%-100% atau > 100%)

Berikut rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja utama dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Kinerja Utama
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

Urutan	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan	Jumlah IKU	Persentase (%)
I	85%-100%	Sangat Baik	6	100
II	75%-84%	Baik	-	-
III	56%-74%	Cukup	-	-
IV	Capaian < 55%	Kurang	-	-

- d) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat berbagai masalah/kendala, namun hal

tersebut telah dan akan diupayakan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasinya.

4.1.2 Saran

1. Diperlukan dukungan dan kerja keras semua pihak dalam pelaksanaan pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai visi dan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
2. Lebih meningkatkan koordinasi dan peningkatan kerjasama yang lebih baik di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan instansi terkait lainnya.

